

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sudah bukan menjadi hal yang asing di mata masyarakat yang mana hampir setiap saat muncul pembaharuan yang lebih modern guna mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi perkembangan teknologi bukan hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani hidup, namun itu juga menjadi tuntutan bagi masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Bila masyarakat tidak mengikuti perkembangan teknologi maka masyarakat tersebut yang akan dinilai sebagai orang yang gagap teknologi (gaptek). Termasuk juga dalam pelaksanaan di dalam pemerintahan yang mana pemerintah dituntut untuk bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Pentingnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berguna dalam upaya pendukung segala hal sebagai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain itu yang menjadi bagian penting dengan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik adalah sebagai upaya membentuk birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel. Bentuk upaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik ini dengan membuat peraturan perundang-undangan sektoral pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dalam pelaksanaan SPBE layanan administrasi menjadi bagian penggunaan perkembangan teknologi informasi sebagai pendukung kegiatan internal sebagai peningkatan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pemerintah. Pada layanan administrasi sebagai pendukung kinerja pemerintah meliputi salah satunya pada bidang kearsipan. Arsip menjadi bagian yang penting dalam instansi sebagai kontribusi penyajian data dan informasi yang kemudian menjadi landasan dalam menyusun sebuah kebijakan di instansi.

“Kearsipan merupakan salah satu bidang kegiatan yang harus terpelihara dengan baik, sehingga ketika diperlukan kembali dapat ditemukan dengan cepat dan tepat serta tetap utuh.”.
(Meilina & Argonanto, 2021)

Pengertian tersebut menandakan bahwa kearsipan merupakan bagian yang penting guna menjadi penyajian data dan informasi serta menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunannya kearsipan memiliki standar yang telah diatur yang disebut dengan Tata Naskah Dinas.

Naskah Dinas merupakan bagian dari komunikasi tertulis antar instansi. Hal itu telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 12 bahwa

“Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.”

Hal yang sama pula juga dijelaskan pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (PERANRI) Nomor 5 Tahun 2021 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa

“Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.”

Dari hal itu bisa disimpulkan bahwa naskah dinas merupakan sebuah informasi tertulis yang digunakan sebagai komunikasi kedinasan atau instansi.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabupaten Wonosobo telah menerapkan SPBE yang mana salah satunya dalam hal tata naskah dinas yang kemudian disebut dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Terkait dengan peraturan sendiri Tata Naskah Dinas di Kabupaten Wonosobo sudah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Namun dalam peraturan tersebut belum dibahas terkait dengan TNDE ataupun belum terdapat regulasi yang ditulis terkait dengan TNDE. Hal itu menandakan bahwa TNDE merupakan bagian yang benar-benar baru di Kabupaten Wonosobo. Upaya pelaksanaan TNDE dilakukan guna memberikan kinerja yang lebih efektif dan efisien pada birokrasi sebagai perwujudan pemerintah yang akuntabel. Apalagi dengan masuknya covid-19 di Indonesia yang memunculkan peraturan untuk melaksanakan kegiatan *Work From Home* (WFH) hal ini menjadikan jawaban atas permasalahan karena komunikasi yang sulit antar instansi khususnya para pejabat di lingkungan pemerintah.

Dalam peraturan Bupati Nomor 08 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 di dalamnya dijelaskan terkait dengan persentase tata naskah dinas elektronik sendiri pada tahun 2021 direncanakan bisa terlaksana hingga 75%, namun pada hasil laporan yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2021 pada bagian urusan wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika besar persentase penerapan tata naskah dinas elektronik hanya 50% yang mana status

capaian yang didapatkan sedang atau pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Hal itu pula menjadikan penerapan TNDE menjadi bagian yang membutuhkan upaya yang paling besar dibanding beberapa program lainnya. Selain itu terkait dengan urusan kearsipan belum terlaksananya TNDE secara menyeluruh juga menjadi permasalahan pada bidang kearsipan.

Dengan adanya inovasi sistem pemerintahan ini dan barunya sistem TNDE ini diterapkan di Kabupaten Wonosobo, namun dengan beberapa kendala atau isu yang dihadapi dalam penerapan TNDE di Kabupaten Wonosobo. Hal itulah yang menjadikan ketertarikan penulis untuk mengulas implementasi pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi TNDE di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, tujuan penelitian dari penelitian sebagai berikut :

1. Guna mengetahui dan menganalisis pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya berhubungan dengan tujuan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pelaksanaan SPBE yang khususnya pada pelaksanaan TNDE

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pelaksanaan SPBE khususnya pada pelaksanaan TNDE

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan berupa inovasi pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta perkembangan layanan utama dan layanan administrasi sebagai pendukung sarana birokrasi yang meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

E. Literature Review

Pada penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu guna memberikan gambaran terkait dengan implementasi penggunaan sistem informasi dan komunikasi di pemerintahan khususnya pada pelaksanaan TNDE. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

No	Nama Penulis, tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Nugraha, 2019)	Model Implementasi Inovasi di Sektor Publik Studi pada Inovasi <i>E-Office</i> Satu	Dalam penelitian ini dijelaskan Sebuah inovasi yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

		Pintu di Puslatbang PKASN LAN	sebagai peningkatan kinerja organisasi yaitu dengan menciptakan layanan internal melalui penggunaan aplikasi <i>E-Office/Tata Naskah Dinas Elektronik</i> sebagai pendukung pelaksanaan <i>e-government</i> dalam pengelolaan surat dinas. Dalam pembahasannya dijelaskan proses implementasi inovasi <i>e-Office</i> dan bentuk faktor yang mendukung dari pelaksanaan tersebut.
2	(Susanti & Huda, 2015)	Sistem Informasi Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang	Dalam penelitian menjelaskan bahwa perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja birokrasi. Sebuah penerapan SPBE dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Sebuah

			<p>aplikasi berbasis elektronik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan serta meningkatkan kinerja pegawai. Dalam pembahasannya dijelaskan langkah-langkah dalam penyusunan sistem informasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang diawali dengan perancangan sistem agar dapat menghasilkan output yang diinginkan.</p>
3	(Susanti et al., 2018)	<p>Penataan Sistem Alur Tata Naskah Dinas Elektronik Direktorat Rumah Susun Kementerian PUPR Jakarta</p>	<p>Dalam artikel dijelaskan bahwa tata naskah dinas merupakan penyelenggaraan komunikasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, pengisian, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas. Pada Tata Naskah Dinas Elektronik di Direktorat Rumah Susun Kementerian PUPR</p>

			<p>masih memiliki kekurangan dan diharapkan ke depannya dapat membuat kinerja di Kementerian PUPR lebih efektif dan efisien. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.</p>
4	(Haryanto & Bakhrudin, 2021)	<p>Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Instansi Kecamatan Pandaan dan Pemerintah Desa Menggunakan Waterfall</p>	<p>Dalam artikel dijelaskan bahwa perpindahan sistem administrasi perkantoran dari manual ke elektronik merupakan hal yang harus dilakukan karena sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang lebih baik lagi. Dalam penelitian ini mengambil kerangka konsep dengan metode Waterfall. Dihasil pembahasan dijelaskan dari bentuk aplikasi yang dapat digunakan dalam hal administrasi kantor. Kesimpulannya perpindahan sistem informasi dari manual ke</p>

			<p>sistem elektronik mempermudah kerja pegawai, dapat meminimalisir risiko kehilangan dokumen dan meningkatkan produktivitas pelayanan publik.</p>
5	(Oktaviana et al., 2022)	<p>Efektivitas Pelaksanaan <i>E-Office</i> Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau</p>	<p>Dalam penelitian ini dibahas mengenai efektivitas pelaksanaan <i>e-Office</i> serta faktor penghambat pelaksanaannya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Provinsi Riau. Jawaban dari permasalahan yang dibahas adalah bahwa dari segi efektivitas peneliti menilai dari segi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketetapan proses yang mana hasilnya tidak efektif. Kemudian dari segi faktor penghambat yaitu : lemahnya komitmen para pelaksana, keterbatasan anggaran, serta faktor kepemimpinan. Dalam</p>

			penelitiannya peneliti menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
6	(Rafi'e & Martono, 2021)	Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik	Dalam artikel ini dibahas terkait dengan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Kemudian terkait dengan administrasi kantor penggunaan elektronik juga dapat mengurangi penumpukan dokumen yang memakan tempat yang banyak, dari segi waktu juga dapat menghemat waktu, serta kemudahan dalam memonitoring aktivitas penggunaan dokumen naskah dinas. Dalam kesimpulannya penggunaan aplikasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih

			<p>baik dan lebih maksimal kedepannya dan dengan adanya penerapan elektronik masyarakat merasa terbantu karena kemudahan dalam mengakses pelayanan.</p>
7	(Palentini et al., 2021)	<p>Pemanfaatan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar</p>	<p>Pada penelitian ini mengkaji terkait dengan pemanfaatan aplikasi TNDE di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Dalam pembahasannya berisi tentang deskripsi secara detail terkait penggunaan aplikasi TNDE di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar termasuk juga soal sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan keunggulan dari aplikasi tersebut. Hal yang didapatkan dari pengkajian ini adalah bahwa penggunaan aplikasi TNDE di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik dengan didukung konsistensi dalam</p>

			<p>memanfaatkan aplikasi oleh para pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>
8	(Prajanti, 2010)	<p>Tinjauan Manajemen Proyek Pada Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Pemerintahan Indonesia Menuju Reformasi Birokrasi</p>	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan terkait dengan tinjauan manajemen proyek dalam implementasi TNDE di pemerintahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik studi literatur dari berbagai sumber yang terkait. Dalam penulisan ini didapatkan hasil pelaksanaan implementasi berdasar <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2014 telah tercapai dalam hal terdapat output aplikasi SiMAYA, tetapi untuk implementasi TNDE ini belum sepenuhnya dapat diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Butuh proses yang tidak singkat</p>

			<p>agar implementasi TNDE dapat dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan di Indonesia. Selain, juga terdapat instansi pemerintah yang mengembangkan TNDE sesuai dengan kebutuhan masing-masing alur kerja, sehingga tidak memanfaatkan aplikasi SiMAYA dalam pelaksanaan TNDE.</p>
9	(Mirawati & Rudiana, 2019)	<p>Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</p>	<p>Dalam artikel dijelaskan bahwa Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan kajian pustaka terhadap hasil monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan TNDE tahun 2017-2018 lingkup Badan Penelitian dan</p>

			<p>Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Data hasil monev penggunaan TNDE terhadap 13 UPT lingkup Balitbangtan, menunjukkan bahwa proses pengiriman persuratan elektronik (surat masuk) sudah berjalan mulai dari eselon 1 hingga UPT tingkat eselon 2. Namun dilihat dari data kegiatan tindak lanjut persuratan elektronik, terdapat lebih dari 50% UPT belum menindaklanjuti persuratan elektronik, yang terdiri atas kegiatan melakukan pemeriksaan surat masuk, mendisposisi surat masuk ke eselon di bawahnya; serta melakukan pemantauan surat masuk yang telah didisposisi.</p>
10	(Dewi et al., 2021)	Manajemen Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) Pada Lembaga	<p>Penelitian ini berisi tentang deskripsi Manajemen SINDE pada LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan</p>

		Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	penelitian kualitatif menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam kesimpulan dari hasil yang dibahas yaitu terkait dengan perencanaan SINDE dengan menerapkan SOP yang berlaku, kemudian membentuk struktur organisasi sebagai pengelola aplikasi, berikutnya melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi dalam menggunakan SINDE, yang terakhir menganalisis hambatan dan kendala pada penggunaan SINDE
--	--	---	---

Tabel 1 Literature Review

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dilihat adanya persamaan maupun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan. Persamaan yang ada dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus dalam penelitian terkait pelaksanaan TNDE yang menjadi bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari segi ulasan yang ditulis ada beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada bentuk program dan aplikasi, kemudian dari bentuk perencanaan dan perancangan sistem yang digunakan pada pelaksanaan TNDE serta dari segi efektivitas pelaksanaan, sedangkan penelitian ini akan mengulas

terkait implementasi dan faktor dalam pelaksanaan TNDE. Berikutnya dalam hal studi kasus juga menjadi pembeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Kabupaten Wonosobo.

F. Kerangka Teori

1. Implementasi kebijakan

a. Definisi Implementasi kebijakan

Implementasi merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat, pihak swasta, atau kelompok masyarakat guna mencapai sebuah tujuan yang telah diputuskan pada kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang ingin dicapai. (Situmorang, 2016)

Berikutnya inti dari implementasi diungkapkan oleh Grindle (1980) yang mengatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dalam prosesnya implementasi akan berjalan apabila tujuan dan sasaran itu telah ditetapkan. Berikutnya dalam implementasi kebijakan yang mana menurut Meter & Horn (1975) implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh beberapa individu maupun beberapa kelompok baik pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Hal ini dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dilaksanakan apabila keputusan kebijakan yang ditetapkan melalui Undang-undang dan penyediaan dana untuk melaksanakan kebijakan belum keluar.

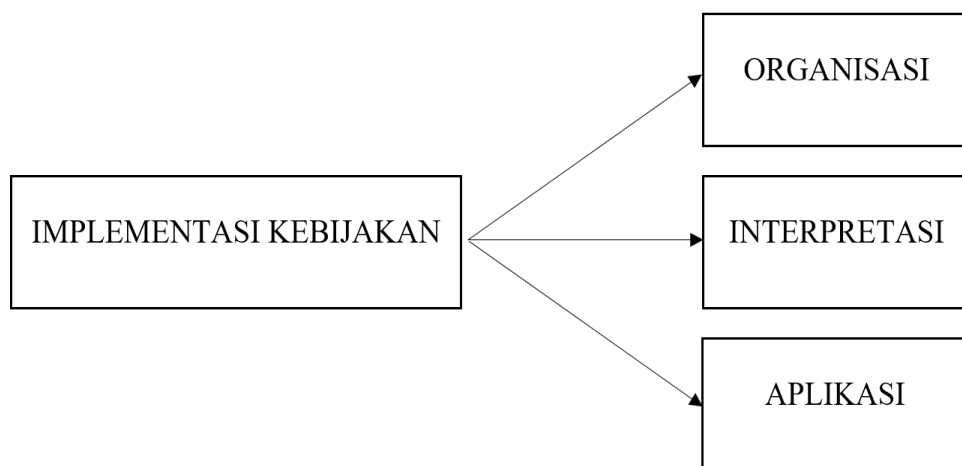
b. Kriteria pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Jones (1984) Implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan melalui sebuah program guna memberikan atau menimbulkan akibat tertentu.

Menurutnya bentuk aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu :

- i. Organisasi, dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka sebuah eksistensi organisasi menjadi pendukung dengan bentuk tugas pokok dan fungsi yang jelas dan terarah serta sebagai pelaksana implementasi harus memiliki kemampuan yang handal dalam menjalankan tugas keorganisasian sehingga kebijakan itu realitas dan dapat diterima oleh kepentingan publik;
- ii. Interpretasi, sebuah kebijakan realistiknya atau idealnya perlu dijabarkan hingga ke dalam hal-hal teknis agar implementor dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang dibuatnya;
- iii. Aplikasi (penerapan), dengan dijalankan organisasi yang fleksibel serta dengan kejelasan atas tataran teknis implementasi maka kebijakan itu akan lebih realistis dan bukan hanya angan-angan yang tidak terwujud;

Berdasarkan ketiga poin di atas terkait dengan aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh , maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Model Implementasi Menurut Jones (1984), dikutip Kadji (2015)

c. Implementasi Kebijakan pada sektor *e-government*

Terus bergeraknya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat sebuah implementasi kebijakan juga ikut mengarah ke dalam penggunaan elektronik. Menurut World Bank dalam Sarrayih & Sriram (2015) mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut

“the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah (berupa jaringan area, internet, dan perangkat komputer) yang memiliki kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga, pihak swasta, dan dengan pemerintah lainnya. *E-Government* juga dijelaskan oleh Teicher et al. (2002) yang menurutnya *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan penerapannya dilakukan oleh pemerintah sebagai penyediaan informasi dan layanan publik kepada masyarakat. *E-Government* dilaksanakan dengan tujuan guna dapat menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan, strategi, dan bentuk layanan publik melalui perkembangan teknologi berupa internet. Menurut Indrajit (2002) dalam *e-government* diklasifikasikan dengan yang ada pada masyarakat sebagai berikut :

i. *Government to Citizens*

Pada klasifikasi ini pemerintah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai tujuan untuk memperbaiki interaksi dengan masyarakat

ii. *Government to Business*

Sebagai pengatur perekonomian negara agar berjalan dengan sebagaimana mestinya dan membuat lingkungan bisnis yang kondusif, dengan menggunakan teknologi informasi guna melaksanakan yang menjadi bagian dari tugas pemerintah tersebut

iii. *Government to Government*

Kemajuan di era globalisasi membuat munculnya kebutuhan akan komunikasi antar negara yang lebih intens dari hari ke hari. Bukan hanya terkait dengan diplomasi namun juga memperlancar kerja sama yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, politik, hubungan sosial budaya, dan lainnya

iv. *Government to Employees*

Sebagai peningkatan kinerja birokrasi dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di institusi pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian dari *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit (2002) penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga elemen yang harus dimiliki agar implementasi kebijakan pada sektor *e-government* tersebut sukses. Berikut masing-masing elemen dalam konsep digitalisasi sektor publik :

i. Support

Sebuah support atau dukungan merupakan hal yang penting sebagai pembangun dan pengembangan *e-government* yang bisa berjalan dengan mulus. Tanpa adanya political will maka pelaksanaan *e-government* itu sulit untuk dilaksanakan karena dari faktor budaya dalam birokrasi yang top down. Bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh para pimpinan yaitu dari segi keputusan yang jelas dalam kerangka *e-government* guna menjadi kunci kesuksesan; pengalokasian dari sumber daya baik dari manusianya, finansial, waktu, tempat, dan lainnya; disediakannya infrastruktur yang memadai

sebagai supporting kerja, termasuk dari kejelasan regulasi; dan pelaksanaan sosialisasi konsep secara merata.

ii. Capacity

Elemen capacity di sini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah dalam menjalankan *e-government*. Tiga hal dasar yang berhubungan dengan capacity ini yaitu : pertama, ketersediaan sumber daya yang cukup, yang mana maksud dari ini adalah dalam hal finansial; kedua, dari ketersediaan infrastruktur khususnya dari teknologi informasi yang memadai karena hal ini menjadi bagian dari keberhasilan dalam pelaksanaan *e-government*; ketiga; ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidangnya.

iii. Value

Dalam elemen ini adalah melihat dari sisi manfaat yang didapatkan dengan dilaksanakannya *e-government* tersebut. Hal ini menandakan pemerintah harus bisa mengkaji sekiranya pembangunan apa yang harus didahulukan agar dapat memberikan manfaat yang signifikan.

2. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

a. Definisi Tata Naskah Dinas

Tata Naskah Dinas merupakan salah satu upaya sebagai pendukung penyelenggaraan *good governance* (pemerintahan yang baik). Secara umum naskah berarti pernyataan yang ditulis sebagai sarana komunikasi untuk memberikan informasi atau kepada orang lain. Hal yang membedakan antara naskah dengan surat yakni naskah memiliki implikasi yang lebih luas dengan banyak jenis yang dikeluarkan, sedangkan surat merupakan bagian dari naskah. Pengertian sederhana dari tata naskah dinas dapat diartikan sebagai alat komunikasi tertulis

kedinasan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah Kabupaten/kota sebagai pendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan regulasi yang dibuat pengertian dari Tata Naskah Dinas yang dituliskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 11 disebutkan Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyampaian naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Selanjutnya terkait dengan pedoman umum tata naskah dinas dituliskan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (PERANRI) Nomor 5 Tahun 2021 yang mana pada pasal 2 ayat satu dijelaskan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah. Berikutnya dalam aturan PERANRI tersebut juga dijelaskan terkait dengan kebijakan Tata Naskah Dinas yang mana pada Pasal 2 ayat 3 dijelaskan Bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Tata Naskah Dinas di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terkait ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas diatur oleh pimpinan Lembaga Negara atau Kepala Daerah.

b. Definisi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) merupakan pengelolaan naskah dinas berbasis elektronik guna mempercepat dan menghemat dalam proses pembuatan naskah dinas. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam BAB Pengertian Umum dijelaskan bahwa Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam melaksanakan pengelolaan TNDE terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya dari segi infrastruktur dan suprastruktur. Dalam infrastruktur dalam PermenpanRB nomor 6 tahun 2011 kelengkapan sistem dari TNDE yaitu : perangkat lunak dan perangkat keras seperti server, jaringan, komputer, pemindai, dan perangkat elektronik lainnya. Berikutnya dari segi suprastruktur yang perlu dipersiapkan yaitu : kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.

Upaya pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja birokrasi serta tertib akan administrasi di lingkungan pemerintah. Rancangan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) difungsikan untuk menangani pengolahan surat dalam pengelolaan arsip yang dinamis bagi pengguna surat dan lembaga negara

G. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan suatu unsur penelitian berdasarkan permasalahan dari yang akan diteliti dengan menggunakan teori yang sudah dipaparkan di atas. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terkait dengan implementasi penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Kabupaten Wonosobo. Maka definisi konseptual dapat diungkapkan dalam variabel berikut :

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah penerapan atau rangkaian proses yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan maupun program dengan mengacu pada hasil Undang-undang dan penganggaran yang sudah dibuat guna mencapai tujuan dan sasaran negara.

2. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan surat-menyurat yang menjadi salah satu komunikasi di lingkungan pemerintah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi guna mempermudah dan mempercepat kinerja birokrasi dan pengambilan keputusan.

H. Definisi Operasional

Dalam memperjelas sebuah permasalahan yang akan diulas pada penelitian maka perlu dijelaskan dari definisi operasional. Mengambil dari Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1984) , maka definisi operasional dituliskan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator	Parameter
1	Model Implementasi Kebijakan	Organisasi	a. Kemampuan sumber daya dalam implementasi
			b. Struktur serta wewenang pada organisasi pelaksana
2		Interpretasi	a. Pembentukan SOP terkait dengan pelaksanaan kebijakan
			b. Pemahaman SOP oleh pelaksana kebijakan

3	Aplikasi	a. Peraturan atau regulasi yang jelas terhadap kebijakan yang dibuat
		b. Sejauh mana implementasi kebijakan dilaksanakan
		c. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan tersebut

Tabel 2 Definisi Operasional

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan secara ilmiah guna memperoleh data sebagai tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2013) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian baru yang nama lainnya disebut dengan metode penelitian naturalistik. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama dan dinamakan dengan metode postpositivistik atau diartikan berlandaskan pada filsafat postpositivisme.(Sugiyono, 2013). Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistik. Pendekatan kualitatif ini berseberangan dengan tradisi pemikiran positivisme dalam pendekatan kuantitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Nugrahani, 2014).

Hal yang menjadikan penulis memilih metode penelitian kualitatif guna memberikan informasi dan data serta penjelasan secara rinci terkait dengan pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo lebih tepatnya terkait dengan implementasi dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Marshall & Rossman (2016) dasar metode yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi yaitu :

a. Wawancara

Wawancara/interview didefinisikan sebagai sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga didapatkan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara dengan pihak terkait yaitu dengan Fahmi Hidayat (Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Wonosobo) sebagai yang ikut serta dalam penyiapan sarana pendukung pelaksanaan TNDE, Irawati (Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo) sebagai pemangku kebijakan dari pelaksanaan TNDE, Sapto (Tenaga Fungsional Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Wonosobo) sebagai penyelenggara dan menjadi panjang tangan dari Lembaga ANRI, dan Tri (Kasubbag Tata Usaha dan Humas, Bagian Umum RSUD KRT Setjonegoro Kabuapten Wonoosbo) sebagai pengguna dari pelaksanaan TNDE. Pada teknik

wawancara peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur guna mendapatkan informasi yang terbuka serta narasumber dapat memberikan yang lebih terkait dengan gagasan ide-ide dan pendapatnya. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada era pandemi covid-19 ini.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan bagian pelengkap dari pengumpulan data observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal/artikel, arsip pemerintah yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data yang beraneka ragam (triangulasi). Menurut Biklen & Bogdan (1981) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data sehingga dapat memberikan informasi kepada orang lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berdasarkan model Miles & Huberman (1984) sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dari banyaknya data yang diperoleh dari pengumpulan data maka perlu dianalisis dan dicatat dengan teliti dan rinci melalui reduksi data. Mereduksi data adalah memilih, memfokuskan data yang telah didapatkan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Pada

penelitian ini penulis akan memfokuskan terkait dengan implementasi pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan memaparkan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Hal ini dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Pada penelitian kualitatif kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya pernah ada yang bentuknya dapat berupa deskriptif atau gambaran sesuai dengan obyek. Penarikan kesimpulan juga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

J. Daftar Pertanyaan Wawancara

Mengacu pada definisi operasional yang telah dituliskan dengan mengambil dari teori dasar model implementasi kebijakan menurut Jones (1984) serta bentuk wawancara yang semiterstruktur, maka beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 - a. Bagaimana gambaran kerangka konsep dari pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo?
 - b. Bagaimana bentuk regulasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo?

- c. Hingga saat ini apa saja sarana dan prasarana serta sumber daya yang sudah dipersiapkan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo?
 - d. Hasil atau capaian apa yang telah didapatkan hingga saat ini terkait dengan pelaksanaan TNDE?
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Wonosobo
- a. Bagaimana capaian pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo?
 - b. Sebagai penyelenggara pelaksanaan TNDE dan penyedia aplikasi web apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan hingga saat ini sudah sampai mana sarana itu terpenuhi?
 - c. Apa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi hingga saat ini dalam pelaksanaan TNDE tersebut?
 - d. Mengapa pelaksanaan TNDE di Kabupaten Wonosobo baru mencapai hasil tersebut?
3. Dinas terkait sebagai pengguna atau pelaksana TNDE
- a. Bagaimana pemahaman yang didapatkan dari pelaksanaan sosialisasi TNDE?
 - b. Kendala atau hambatan apa saja yang dialami sebagai pengguna?
 - c. Apakah pelaksanaan TNDE sudah dilaksanakan dengan apa yang diharapkan?
 - d. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana dalam menjalankan penerapan TNDE di dinas?